Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik
Volume X | Nomor X | Tahun 20XX

Pengaruh Kebijakan Defisit Fiskal dalam Perekonomian Indonesia

Vanda Carolina Aprilia Lovenita[1], Isniah Zahrotun Nisa[2], Charisma Kautsarani[3]
Politeknik Keuangan Negara STAN
4111220091_vanda@pknstan.ac.id
0895808680001

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
XX XX XXXX

Dinyatakan Diterima
XX XX XXXX

ABSTRACT

Indonesia is a developing country that wants to expand its national infrastructure. The issue of budget reduction development strategy has received quite extensive attention in macroeconomic policy as a sustainable economic development policy program. This study examines the state budget deficit policy with the aim of understanding the benefits of using deficit policies in the Indonesian economy. This study uses a quantitative method based on a literature review to provide the findings of this study. Data obtained from the official website of the Ministry of Finance and official news sites. In addition, academic journals were also used in this study. Choose a quantitative method to help students understand the information obtained from this study. This policy began with the stipulation of the 2004 State Budget, when the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2003 was repealed. In 2020, the whole world will experience a crisis that will cause economic growth to slow down. The 2020 fiscal deficit increased to around 6.34%. There is no need to worry about a fiscal deficit because the government can overcome it in various ways. The government's utilization of the fiscal deficit in the state budget is a significant issue that must be addressed.
Keywords : *govenrment, deficit, fiscal, economy, regulation*

ABSTRAK

Indonesia adalah negara berkembang yang ingin memperluas infrastruktur nasionalnya. Isu strategi pembangunan pengurangan anggaran mendapatkan perhatian yang cukup luas dalam kebijakan makroekonomi sebagai program kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Studi ini mengkaji kebijakan defisit APBN dengan tujuan untuk memahami manfaat penggunaan kebijakan defisit dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan tinjauan literatur untuk memberikan temuan dari penelitian ini. Data diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan dan situs berita resmi. Selain itu, jurnal akademik juga digunakan dalam penelitian ini. Memilih metode kuantitatif untuk membantu siswa memahami informasi yang diperoleh dari penelitian ini. Kebijakan ini dimulai sejak ditetapkannya APBN tahun 2004, saat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 dicabut. Pada tahun 2020, seluruh dunia akan mengalami krisis yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Defisit fiskal tahun 2020 meningkat menjadi sekitar 6,34%. Defisit fiskal tidak perlu dikhawatirkan karena pemerintah dapat mengatasinya melalui berbagai cara. Pemanfaatan defisit fiskal dalam APBN oleh pemerintah merupakan isu signifikan yang harus dibenahi.
Kata kunci: pemerintah, defisit,fiskal, ekonomi, regulasi

1. PENDAHULUAN

Saat ini, dunia sedang berada di masa pembangunan berkelanjutan yang disebut SDGs. Sebagai negara berkembang tentunya pembangunan adalah hal yang menjadi pokok bahasan. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan nasional. Namun, pendanaan untuk pembangunan nasional ini cukup besar. Maka, pemerintah menggunakan kebijakan defisit fiskal dengan ketetapan maksimal tiga persen setiap tahunnya untuk mendorong pembangunan nasional. Defisit fiskal adalah suatu kebijakan menetapkan pengeluaran melebihi pendapatan yang diterima. Untuk menutupi defisit, pemerintah bisa menggunakan tiga cara, yaitu utang luar negeri, pajak, dan utang terhadaop warga negara. Hal paling mudah untuk menutupi defisit adalah utang. Pajak sulit diterapkan karena pajak yang besar tentu akan membebani masyarakat. Oleh karena itu, efek dari kebijakan fiskal ini adalah utang luar negeri yang meningkat. Utang digunakan oleh negara untuk menutupi defisit yang ada, sehingga terdapat efek negatif yang diterima. Efek negatif dari utang negara akibat defisit adalah ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara maju. Ketergantungan ini bisa dimanfaatkan oleh negara maju untuk mencampuri urusan negara dengan perjanjian terkait. Adanya sumber pembiayaan defisit dengan cara yang berbeda, ternyata menghasilkan kinerja makroekonomi yang berbeda pula. Pemilihan sumber pembiayaan merupakan hal yang harus diperhatikan.

Sumber pembiayaan yang lebih sedikit daripada pengeluaran menyebabkan terjadinya defisit anggaran pemerintah yang dapat mengganggu ketahanan fiskal. Untuk memenuhi anggaran ini pemerintah mengambil hutang luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan. Di sisi lain pemerintah harus menjaga kesinambungan fiskal agar tidak bergantung pada luar negeri.

Isu strategi pembiayaan defisit anggaran mendapatkan perhatian yang cukup luas dalam kebijakan makroekonomi sebagai program kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bagi negara Indonesia, isu defisit anggaran mendapatkan perhatian sejak Orde Baru. Hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi cukup tinggi karena pembiayaan defisit anggaran melalui cetak uang. Pengalaman waktu itu membuat pemerintah mencoba memperbaiki kembali dengan anggaran berimbang dan dinamis untuk menggantikan anggaran moneter. Anggaran tersebut dibuat dengan tujuan untuk menertibkan defisit anggaran dari hutang luar negeri. Diikutsertakannya hutang luar negeri sebagai sumber penerimaan negara, anggaran terlihat sebagai balance budget.

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menggunakan metode defisit dalam kebijakan anggaran pendapatan dan belanjanya. Singapura dan Amerika Serikat merupakan contoh negara maju yang menggunakan metode defisit. Media berita sering membawakan isu utang pemerintah terhadap luar negeri sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Apalagi, media sosial yang semakin marak dan mudah digunakan untuk melakukan diskusi antar masyarakat. Kondisi dunia akibat pandemi COVID-19 memperparah kekhawatiran masyarakat. Banyak kekhawatiran yang muncul setelah masyarakat mengetahui kebijakan pemerintah yang menerapkan defisit anggaran. Salah satu persoalan yang dikhawatirkan muncul adalah terkait inflasi dan pertumbuhan penduduk.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Negara-negara di dunia digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu negara terbelakang, berkembang, dan maju. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang. Indikator negara berkembang, salah satunya dapat dilihat dari perhitungan Produk Domestik Bruto negara Indonesia yang cenderung rendah dibandingkan dengan negara maju, seperti Singapura. Saat ini memiliki fokus utama, yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah perubahan ekonomi suatu negara untuk menjadi lebih baik dengan proses yang berkesinambungan dalam jangka tertentu. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai pergerakan perokonomian akibat berbagai unsur sektor dalam sebuah negara, baik unsur dari dalam maupun luar negeri. Meningkatkan laju perekonomian dianggapakan menyebabkan taraf hidup masyarakat meningkat Hal ini dilakukan dengan melihat pertimbangan bahwa standar hidup lebih tinggi akan membuka kesempatan kerja yang lebih besar dan akan memberikan dampak positif, yaitu mengatasi permasalahan ekonomi di tingkat keluarga hingga akhirnya berdampak besar bagi perekonomian negara sendiri. Menurut teori ekonomi oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Srumpter, bahwa populasi, modal, dan kapitalisme menjadi komponen yang penting bagi pembangunan ekonomi.

Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dengan menekankan penghematan dan keuntungan di bidang-bidang seperti pengeluaran pemerintah. Dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara diharapkan akan positif di segala aspek perekonomian. Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika menyangkut dampak inflasi di negara tertentu. Secara teori, kebijakan fiskal ekspansif yang diterapkan di suatu negara untuk meningkatkan PDB tanpa menaikkan pajak, yang merupakan salah satu kebijakan terpenting bagi keuangan pemerintah, akan menghasilkan inflasi yang lebih tinggi. (A. & Farlian, 2018)

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal sebagai alat untuk mengatur kondisi perekonomian di indonesia. Saat ini, kebijakan yang dianut Indonesia adalah kebijakan defisit fiskal. Keadaan perekonomian negara bisa dilihat melalui neraca pembayan negara terkait. Neraca pembayaran menurut Bank Indonesia adalah catatan transaksi antara penduduk dan bukan penduduk Indonesia (Astuti & Ayuningtyas, 2018). Neraca dianggap surplus apabila tingkat pendapatannya lebih besar daripada tingkat belanja atau kewajibannya. Jka Indonesia menganut sistem defisit fiskal itu berarti tingkat belanja negara Indonesia lebih besar dibandingkan tingkat pendapatannya. Kebijakan ini sangat mempengaruhi Indonesia karena adanya dampak dari pembiayaan kekurangan biaya tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji kebijakan defisit APBN dengan tujuan memahami keuntungan penggunaan kebijakan defisit dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur untuk memberikan gambaran dari penelitian. Data dihimpun berasal dari situs web resmi Kementerian Keuangan dan situs berita resmi. Selain itu, jurnal ilmiah juga digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan metode kualitatif untuk mempermudah pembaca memahami informasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kebijakan defisit anggaran diterapkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mulai diterapkan pada penyusunan APBN tahun 2004 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003. Barro menyatakan bahwa salah satu penyebab kebijakan defisit anggaran yaitu dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, diperlukan investasi dan dana yang besar pula. Jika dana dalam negeri tidak dapat mencukupi pembiayaan, negara meminjam ke luar negeri untuk menghindari kebijakan peningkatan tarif pajak pada warga negara.

Defisit anggaran merupakan kebijakan yang biasa selama anggaran untuk pembiayaan dan belanja negara yang dikeluarkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber pembiayaan APBN berasal dari pinjaman, utamanya pinjaman luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemerintah untuk memperkuat Pinjaman Luar Negeri (PLN) menjadi semakin penting dalam kebijakan moneter negara. Akibatnya, pinjaman yang disebutkan di atas digunakan sebagai satu-satunya sumber pengembangan dan pemeliharaan, dengan tujuan mengurangi tekanan finansial. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui APBN. Selain itu, pemerintah membantu mengidentifikasi proyek mana yang menjadi prioritas pembangunan, serta memberikan waktu bagi kementerian dan/atau lembaga untuk mengajukan proposal proyek yang akan dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan data BI, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), terlihat jelas bahwa jika pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebijakan luar negeri melalui program, itu karena program memiliki peluang sukses yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Pemerintah harus mempertimbangkan beberapa prinsip ketika mengembangkan kebijakan luar negeri dan menerapkannya untuk memastikan efektivitasnya. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah kehati-hatian fiskal, perilaku etis, dan pelestarian sumber daya alam di dalam dan di luar perbatasan. Selain itu, Pinjaman Kementerian/Lembaga Penarik perlu menggunakan dana pemerintah secara bijaksana untuk melaksanakan proyek secara efisien dan efektif, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari upaya mereka.

Ratnah dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Defisit APBN Indonesia (2015) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dengan defisit APBN. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap defisit apabila PDB meningkat sehingga kegiatan ekonomi sektor riil meningkat. Peningkatan kegiatan ekonomi memengaruhi penerimaan pemerintah melalui penerimaan perpajakan akibat meningkatnya keuntungan usaha. Dengan demikian, penerimaan perpajakan meningkat dan akan mengakibatkan defisit APBN menurun.

Pada tahun 2020, seluruh dunia akan mengalami kekacauan yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Saat ini, Indonesia telah menetapkan APBN untuk tahun 2020 dan bukan tahun 2019. Namun, karena kurangnya konsensus, Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 72 untuk tahun anggaran 2020, yang menguraikan prioritas fiskal negara dan proyeksi penerimaan tahun 2020. Defisit fiskal dalam APBN tahun 2020 sebelum perubahan terhadap PDB sebesar 1,84%. Selanjutnya, mengikuti perubahan tersebut, defisit fiskal meningkat menjadi sekitar 6,34%. Hal ini terjadi karena total PDB negara pada tahun 2020 semakin meningkat. Pemerintah Indonesia harus sesegera mungkin mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh sistem politik dengan menerapkan kebijakan yang direstrukturisasi dan memfokuskan kembali pada kebutuhan rakyat. Selain itu, nilai suatu negara semakin merosot karena banyaknya sektor ekonomi yang mengalami kebangkrutan dan, dalam beberapa kasus, seperti kebangkrutan. Pemerintah juga melakukan langkah-langkah stimulus untuk mendorong perekonomian, salah satunya dengan meningkatkan rata-rata konsumsi rumah tangga. Untuk meningkatkan tingkat konsumsi, pemerintah memberikan insentif kepada pemilik usaha dan pinjaman

jangka panjang kepada masyarakat umum, memastikan bahwa keterpurukan ekonomi tidak berlangsung selamanya.

	(dalam trilliun rupiah)	2020 APBN(Perpres 72/2020)	2021 APBN	2022 APBN
A.	**Pendapatan Negara**	1699.95	1743.6	1846.1
	I. Pendapatan Dalam Negeri	1698.65	1742.7	1845.6
	1. Penerimaan Perpajakan	1404.51	1445.4	1510
	2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	294.14	298.2	335.6
	II. Penerimaan Hibah	1.3	0.9	0.6
B.	**Belanja Negara**	2739.17	2750	2714.2
	I. Belanja Pemerintah Pusat	1975.24	1954549	1944.5
	II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	763.93	795479.5	769.6
C.	**Keseimbangan Primer**	-700.43	-633.1	-434.4
D.	**Surplus/(Defisit) Anggaran**	-1039.22	-1006.4	-868
	% Defisit terhadap PDB	-6.34	-5.70%	-4.85%
E.	**Pembiayaan Anggaran**	1039.22	1006.4	868

Tabel 1 menunjukkan perbandingan APBN dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada APBN tahun 2020, defisit anggaran terhadap PDB sebesar 6,34%. Angka ini merupakan defisit terbesar selama 10 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan pembiayaan negara meningkat akibat pandemi yaitu untuk pembiayaan penanganan covid-19 dan mendorong perekonomian yang menurun akibat berhentinya aktivitas perdagangan. Pada APBN tahun 2021 dan tahun 2022, defisit APBN terhadap PDB mulai menurun. Hal ini terjadi sebagai dampak dari Program Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai respon dari kekacauan yang sedang berlangsung.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berfungsi untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan selaku pemangku kebijakan fiskal menerbitkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Salah satunya yaitu insentif pajak UMKM yang meniadakan setoran pajak PPh Final 0.5%. Pihak-pihak yang melakukan transaksi terhadap UMKM juga tidak dilakukan pemungutan pajak. Insentif perpajakan lainnya dalam stimulus Covid-19 adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP), Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, dan Pengembalian Pendahuluan PPN. Selain itu, pemerintah memberikan pendanaan pada korporasi padat karya. Total pendanaan untuk restrukturisasi korporasi dan pengembangan ekonomi melebihi Rp53,57 triliun. Bisnis dengan jiwa kewirausahaan yang kuat dapat memanfaatkan layanan reorganisasi yang disediakan oleh pemerintah.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2017-2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	*Outlook* 2021	APBN 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5.1	5.2	5.0	-2.1	3,7 - 4,5	5.2
Inflasi (%,yoy)	3.6	3.1	2.7	1.7	1,8 - 2,5	3.0
Nilai Tukar (Rp/US$)	13,384	14,247	14,146	14,577	14.200 - 14.600	14,350
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%) *	n.a	n.a	n.a	n.a	6,34 - 7,24	6.80
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4.98	4.97	5.62	3.19		
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	51	67	62	40	55 - 65	63
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	804	778	746	707	680 - 705	703
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1,142	1,145	1,057	983	987 - 1.007	1,036

* Sebelum tahun 2021 menggunakan asumsi suku bunga SPN 3 Bulan
Proyeksi PDB Nominal 2022 sekitar Rp17.897,3 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 2 merupakan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Ditunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menurun pada tahun tahun 2020 sejalan dengan naiknya defisit yang terjadi (pada tabel 1) karena dampak dari pandemi. Dalam keadaan normal, meskipun APBN menerapkan sistem defisit anggaran, pertumbuhan ekonomi tetap terjadi sekitar 5% per tahun. Persentase defisit fiskal dihitung dari perbandingan antara selisih penerimaan dan pengeluaran negara terhadap PDB. PDB sendiri tidak dapat dijadikan dasar dalam menggambarkan kesejahteraan rakyat secara pasti karena PDB tidak memperhitungkan hal-hal lain.

Surplus anggaran bukan selalu hal yang baik. Surplus anggaran bisa jadi karena pemerintah tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik. Kebijakan surplus anggaran biasanya diambil oleh negara yang ingin mengendalikan tingkat inflasi. Anggaran pada kebijakan surplus dibuat menyesuaikan dengan kenaikan tingkat harga barang dan jasa.

Kebijakan defisit anggaran dinilai lebih efektif digunakan dalam perekonomian Indonesia yang saat ini masih melakukan pembangunan nasional. Dengan kebijakan ini, Indonesia berhasil bertahan pada ketidakpastian ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19. Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, Indonesia masih bisa membiayai pengeluaran untuk program pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi, tingkat defisit anggaran harus dapat dikendalikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Country	Debt To GDP Ratio ▼	2023 Population
Japan	237.00%	123,294,513
Greece	177.00%	10,341,277
Lebanon	151.00%	5,353,930
Italy	135.00%	58,870,762

Sumber: World Population Review

Tabel 3 berisi daftar negara dan jumlah hutang luar negeri yang dimiliki oleh negara-negara di dunia. Jepang, Italia, dan Singapura termasuk negara maju di dunia. Terlihat bahwa beberapa negara memiliki jumlah hutang luar negeri yang besar, bahkan jepang menduduki nomor satu jumlah hutang terbesar. Negara-negara tersebut memiliki hutang yang besar namun pertumbuhan penduduknya dapat mendorong perekonomian negaranya.

1. Japan (¥1,028 trilliun ($9.087 trilliun USD))
2. Greece (€332.6 billiun ($379 billiun US))
3. Portugal (€232 billiun ($264 billion US))
4. Italy (€2.17 trilliun ($2.48 trilliun US))
5. Bhutan ($2.33 billiun (USD))
6. Cyprus (€18.95 billiun ($21.64 billiun USD))
7. Belgium (€399.5 billiun ($456.18 billiun USD))
8. United States of America ($19.23 trillun (USD))
9. Spain (€1.09 trilliun ($1.24 USD))
10. Singapore ($350 billiun ($254 billiun US))

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Defisit fiskal tidak perlu ditakutkan, dibuktikan dengan adanya pertumbuhan perekonomian dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan tahun 2021 ke tahun 2022 setelah terjadi lonjakan defisit fiskal pada tahun 2020 karena covid-19. Menunjukkan bahwa defisit fiskal bukan hal yang menakutkan karena negara masih bisa mengatasinya dengan berbagai upaya, contohnya melalui Program Pembangunan Ekonomi Nasional

Kebijakan defisit fiskal dalam APBN yang digunakan pemerintah merupakan sebuah langkah yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus berusaha untuk menurunkan angka defisit fiskal terhadap PDB secara perlahan namun pasti. Penerimaan yang semakin meningkat dan pengeluaran yang juga meningkat diharapkan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Dengan begitu, isu yang rentan timbul di kalangan masyarakat dapat teredam. Alangkah baiknya, pemerintah membuat sosialisasi mengenai APBN dan segala kebijakannya untuk mengatasi banyaknya berita provokasi terhadap pemerintahan.

Untuk penelitian selanjutnya, sumber-sumber lebih digali terutama di sudut pandang yang berbeda dengan penelitian ini. Faktor-faktor yang memengaruhi juga sebaiknya ditambah dengan mengambil data ekonomi negara lain yang setara dengan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A., K. and Farlian, T. (2018) "ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKRO DAN DEFISIT ANGGARAN DI INDONESIA ," Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), 3(4), pp. 625–632.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI. (2015). Peran Positif Defisit Anggaran Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

cnbcindonesia.com. (2022, 30 Mei). Ini 10 negara dengan utang terbanyak. Diakses pada 22 Januari 2022, dari https://www.cnbcindonesia.com/market/20220529235426-17-342694/ini-10-negara dengan-utang-terbanyak-ri-masuk-daftar

Harahap, I. (2019). Ekonomi pembangunan: pendekatan transdisipliner.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pen.kemenkeu.go.id. Diakses pada 15 Januari 2022, dari https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen

Ratnah. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP DEFISIT APBN INDONESIA (Vol. 3).

Shintya, F., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Ekspor, Impor, Defisit Fiskal, Dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2017–2020. Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 15(2), 358-369.

Suleman, A. R., Ahdiyat, M., Nainggolan, L. E., Rahmadana, M. F., Syafii, A., Susanti, E., ... & Siregar, R. T. (2020). Ekonomi Makro. Yayasan Kita Menulis.

Ussa'diyah, N., & Vidriza, U. (2022). PERAN PINJAMAN LUAR NEGERI DALAM APBN PADA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA. In Journal Of Development Economic and Digitalization (Vol. 1, Issue 1).FAQ Perppu 1 2020. (n.d.).

worldpopulationreview.com. IDebt to GDP Ratio by Country 2023. Diakses pada 22 Januari 2022, dari https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-by-national-debt

worldpopulationreview.com. (2022, 11 Oktober) World Economic Outlook Databese. Diakses pada 22 Januari 2022, dari https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending

Zaroni, A. N. (2015). Globalisasi ekonomi dan implikasinya bagi negara-negara berkembang: telaah pendekatan ekonomi islam. Al-Tijary, 1-22.